

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tanggal 13 Agustus 2020 terjadi peristiwa penting di mana terdapat sebuah kesepakatan yakni normalisasi hubungan antara Israel dan Uni Emirat Arab (UEA). Normalisasi hubungan antara Israel dan Uni Emirat Arab menemui momentum penting dalam bentuk kesepakatan. Kedua negara tersebut untuk “sepenuhnya menormalisasi hubungan” yang ditandai dengan adanya kesepakatan *Abraham Accord*. Kedua negara turut serta mengirimkan masing-masing perwakilan diplomatik dalam kesepakatan normalisasi mereka yakni, Presiden Khalifa bin Zayed Al Nahyan yang mewakili Uni Emirat Arab dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang mewakili Israel. Selain itu, Putra Mahkota Abu Dhabi Mohammed Al Nahyan dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan bahwa adanya normalisasi hubungan yang disepakati diharapkan bisa menciptakan perdamaian terhadap kawasan Timur Tengah terutama kedua negara tersebut yang sudah secara umum diketahui terlibat eskalasi konflik Israel dengan Palestina (Harkov & Nahmias, 2020).

Akan tetapi, kebijakan Uni Emirat Arab melakukan normalisasi hubungan dengan Israel menghadirkan beberapa kontroversi. Pertama ialah, dimana sebelum normalisasi terjadi keikutsertaan UEA dalam Liga Arab dan GCC juga akibat perjanjian Arab Peace Initiative, menjadikan UEA menolak untuk mengakui Israel sebagai negara yang berdaulat dan melarang masuknya warga negara Israel di wilayah UEA sesuai dengan upaya boikot yang dilakukan oleh Liga Arab.

Lalu, kontroversi berikutnya ialah munculnya beberapa penolakan dari beberapa negara-negara Arab. Mereka menilai Uni Emirat Arab dalam normalisasi tersebut mengkhianati upaya kemerdekaan Palestina. Secara historis, Uni Emirat Arab mempunyai posisi sebagai negara penolak eksistensi Israel di Timur Tengah bersamaan dengan negara Arab lainnya yang menolak adanya kerjasama dalam bentuk apapun dengan Israel selama masih berlakunya *The Peace Initiative*. Perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang di inisiasi oleh Arab Saudi dan didukung oleh Liga Arab untuk digunakan sebagai suatu syarat jika Israel ingin menormalisasi hubungan dengan negara-negara Arab (Podeh, 2014). Penolakan dan respon negatif datang dari negara-negara seperti Palestina, Iran, Oman, Turki dan Qatar yang tidak setuju dengan adanya normalisasi tersebut karena mereka menganggap bahwa dengan adanya normalisasi tersebut merupakan sebuah pengkhianatan dari Uni Emirat Arab terhadap Palestina dan bisa melemahkan solidaritas negara-negara Arab dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. (Washington Institute, 2020) Bahkan, Turki berpendapat bahwa UEA memiliki tujuan rahasia dalam normalisasi yang disepakati dengan Israel (Derajat & Kurniawan, 2022).

Dengan demikian, adanya beberapa kontroversi diatas menjadikan normalisasi yang terjadi menimbulkan sebuah pertanyaan bagi dunia internasional khususnya bagi negara-negara Arab. Apa alasan sebenarnya dibalik normalisasi tersebut, mengapa UEA melakukan normalisasi hubungan dengan Israel yang notabene merupakan musuh bersama dari negara-negara Arab dalam konflik Israel-Palestina. Penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan tersebut, dengan

menjelaskan bahwa alasan yang mendorong UEA melakukan normalisasi adalah tentang *National Security* berupa hadirnya persepsi ancaman terhadap Iran di Kawasan. Persepsi ancaman Iran terhadap UEA di Kawasan mendorong UEA melakukan normalisasi hubungan dengan Israel.

Meskipun Uni Emirat Arab dan Iran merupakan dua negara yang letaknya berdekatan, namun kedua negara tersebut memiliki latar belakang sosial dan politik yang berbeda. Iran, dengan sejarah panjang sebagai kekuatan besar di kawasan, dikenal dengan pengaruhnya yang kuat dalam politik regional. Sebaliknya, UEA, meskipun merupakan negara kecil, telah tumbuh menjadi pemain penting di kawasan berkat stabilitas ekonomi dan hubungan internasional yang luas (Gause, 2012).

Perbedaan ideologi politik dan sistem pemerintahan UEA dan Iran yaitu UEA yang merupakan negara monarki dengan struktur pemerintahan terpusat sedangkan Iran adalah negara dengan sistem Republik Islam, menjadikan kedua negara tersebut mempunyai perbedaan dalam pengambilan kebijakan terhadap isu regional di Kawasan (Ulrichsen, 2016). Hubungan Iran dan UEA yang kurang baik telah terlihat pada keterlibatan kedua negara tersebut dalam sengketa wilayah atas tiga pulau yaitu Greater Tunb, Lesser Tunb, dan Abu Musa yang terletak di Teluk Persia. Pulau-pulau tersebut menjadi titik perdebatan di antara kedua negara sejak tahun 1971, ketika Iran mengklaim kedaulatan terhadap pulau-pulau tersebut setelah Inggris pergi. UEA, di sisi lain, mengklaim pulau-pulau tersebut sebagai bagian dari wilayahnya berdasarkan sejarah. Sengketa ini terus menjadi salah satu sumber ketegangan antara kedua negara hingga sekarang.

Pada abad ke-21, kebijakan luar negeri Iran yang lebih agresif di kawasan Timur Tengah menjadi semakin jelas, terutama dalam konteks program nuklirnya dan keterlibatannya dalam konflik-konflik seperti di Suriah, Irak, dan Yaman. Iran memanfaatkan kekuatan militer dan jaringan proksi untuk memperluas pengaruhnya, yang menyebabkan ketegangan dengan negara-negara Arab, termasuk UEA. Selain itu, kebijakan Iran yang mendukung kelompok-kelompok Syiah, seperti Hizbullah di Lebanon dan Houthi di Yaman, semakin membuat negara-negara seperti UEA merasa terancam (Al-Rasheed, 2010)

Program nuklir Iran juga menjadi pusat perhatian internasional dan memicu ketidakpastian di kawasan tersebut. Bagi UEA, potensi kebangkitan kekuatan nuklir Iran membawa risiko bagi stabilitas kawasan, karena Iran bisa menggunakan kekuatan ini untuk menantang dominasi negara-negara Teluk, termasuk UEA. Selain itu, Iran juga mengembangkan kemampuan senjata strategis yaitu rudal balistik yang semakin memperburuk rasa ketidakamanan negara-negara tetangga seperti Uni Emirat Arab (Mousavian, 2012).

Seiring berjalannya waktu, UEA mulai melihat Iran sebagai ancaman strategis di kawasan Timur Tengah. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya beberapa alasan yang mendasari persepsi tersebut meliputi Pengaruh Ideologi Syiah, dimana Iran berusaha menyebarkan ideologi Syiah ke negara-negara Arab, yang sebagian besar mayoritas Sunni. Hal ini meningkatkan ketegangan sektarian di seluruh wilayah, dan UEA khawatir akan dampaknya terhadap stabilitas internal mereka. Kemudian adanya alasan Militerisasi dan Program Nuklir Iran. Yaitu Perkembangan program nuklir Iran dan kemampuannya dalam mengembangkan

rudal balistik mengancam keseimbangan kekuatan di Teluk Persia. Bagi UEA, yang bersekutu erat dengan negara-negara Barat, ancaman ini dianggap bisa memengaruhi kebijakan keamanan regional. Alasan yang terakhir adalah keterlibatan Iran dalam konflik wilayah. Keterlibatan langsung dan tidak langsung Iran dalam konflik-konflik regional, termasuk di Suriah, Yaman, dan Irak, semakin memperburuk hubungan dengan UEA (Gause, 2012). Keberadaan proksi-proksi Iran yang beroperasi di negara-negara ini menambah ketegangan, dan UEA sering terlibat dalam kebijakan yang berlawanan dengan kepentingan Iran.

Ketegangan antara Iran dan Uni Emirat Arab mencerminkan dinamika yang lebih luas di kawasan Timur Tengah, di mana konflik ideologi, persaingan geopolitik, dan kepentingan nasional bertemu. Iran, yang ingin menegaskan pengaruhnya di Timur Tengah, dipersepsikan oleh UEA sebagai ancaman terhadap kestabilan regional dan kelangsungan politik negara-negara Teluk. Dalam penelitian ini penulis berusaha menjelaskan bagaimana ketegangan-ketegangan antara UEA dengan Iran khususnya dalam beberapa dekade terakhir tersebut yang kemudian mendorong UEA melakukan kebijakan normalisasi dengan Israel.

Dengan adanya kekosongan dari penelitian-penelitian terdahulu, penelitian ini membawakan fokus penelitian yang baru dan berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya terkait topik normalisasi hubungan antara Uni Emirat Arab dengan Israel yang berfokus menganalisa normalisasi hubungan antara Uni Emirat Arab dengan Israel menggunakan kerangka teori *Balance of Threat*.

1.2 Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah dari penelitian ini adalah **“Mengapa Uni Emirat Arab melakukan strategi kebijakan berupa normalisasi hubungan dengan Israel ?”**

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Secara Umum penelitian ini bertujuan untuk memahami normalisasi hubungan antara Uni Emirat Arab dan Israel

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan dalam penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian ini dengan memaparkan respon Uni Emirat Arab dalam menghadapi ancaman Iran di Kawasan serta mengidentifikasi sumber ancaman Iran dari kacamata teori *Balance of Threat* yang merupakan turunan dari teori Neorealisme.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian terbagi menjadi manfaat akademis dan praktis dengan penjabaran sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Akademis

Memberikan wawasan dan pengetahuan tambahan dalam studi Hubungan Internasional khususnya mengenai topik normalisasi hubungan Uni Emirat Arab dengan Israel pada tahun 2020. Selain itu, Menjadi sumbangan pemikiran terhadap kajian internasional agar mengetahui respon Uni Emirat Arab terhadap ancaman

Iran di Kawasan dengan melakukan normalisasi hubungan dengan Israel pada tahun 2020.

1.4.2 Manfaat Praktis

Memberikan gambaran serta analisis mengapa Uni Emirat Arab merespon ancaman Iran di Kawasan dengan melakukan normalisasi hubungan dengan Israel pada tahun 2020. Lalu, memberikan gambaran serta analisis mengenai respon suatu negara untuk menghadapi ancaman dari negara lain dapat mengikat dan mempengaruhi suatu negara untuk melakukan normalisasi hubungan dengan negara lain yang diharapkan kedepannya dapat menjadi referensi bagi penelitian lain berikutnya.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

Penelitian yang penulis angkat pada tulisan ini membahas mengenai upaya Uni Emirat Arab menghadapi sebuah ancaman di Kawasan Timur Tengah sehingga melakukan aliansi dalam bentuk normalisasi hubungan dengan Israel sebagai cara dalam menghadapi ancaman tersebut. Untuk penguatan penelitian, penulis merangkum ada lima literatur yang menjadi dasar dan kajian terdahulu dalam membahas sebuah fenomena yang terjadi di kawasan Timur Tengah tersebut.

Penulisan penelitian ini juga berusaha mengisi kekosongan penelitian terdahulu, dimana hasil penelitian - penelitian terdahulu merupakan artikel - artikel penelitian yang menjadi acuan penulis untuk melihat lebih jauh dan menjadi dasar dari penulis untuk meneliti kasus yang berkaitan dengan normalisasi Israel dan Uni Emirat Arab ini. Kobi Michael dan Udi Dekel dalam tulisannya yang berjudul *“Israel-Uni Emirate Arab Normalization of Relations: At the Expense*

Palestinians?” menjelaskan mengenai normalisasi Israel-Uni Emirat Arab ini dari perspektif Palestina yang mana dengan adanya normalisasi ini Palestina semakin merasa dukungan dari negara Arab berkurang dan hal inilah membuat Palestina frustrasi (Dekel, 2020). Lalu, (Itzhakov, 2020) dalam penelitiannya “*Iran and Israel-Uni Emirat Arab Deal*” menjelaskan bahwa kasus normalisasi kedua negara tersebut dari perspektif Iran yang mengecam dengan keras terhadap apa yang dilakukan oleh Uni Emirat Arab dengan menormalisasi hubungannya dengan Israel dan menyebutnya sebagai pengkhianatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan Islam. Kedua penelitian tersebut merujuk pada respon negara-negara Arab yakni Palestina dan Iran yang sama-sama mengecam dan menolak kebijakan Uni Emirat Arab yang melakukan normalisasi hubungan dengan Israel.

Lebih jauh lagi, penelitian Glen Segell yang berjudul “*No Illusions About the Israel and United Arab Emirates Normalization*” menjelaskan posisi Uni Emirat Arab dalam hubungan normalisasi yang dilakukan dengan Israel. Dimana, Uni Emirat Arab merupakan negara Arab pertama yang tidak pernah berperang dengan Israel dan melakukan normalisasi hubungan. Tulisan tersebut juga menjelaskan bahwa normalisasi hubungan yang dilakukan oleh kedua negara bukanlah sebuah perjanjian damai akan tetapi lebih kepada pengakuan Uni Emirat Arab terhadap Israel sebagai negara yang berdaulat. (Segell et al., 2020) Kemudian, penelitian Simela Victor Muhamad yang berjudul “*Normalization of the Arab-Israel Emirate Union Relationship and Palestine Issues*” menjelaskan bahwa alasan kedua negara antara Uni Emirat Arab dan Israel melakukan normalisasi hubungan didasari adanya kepentingan ekonomi dari kedua negara. Dalam artikel

tersebut, penulis juga menjelaskan keterkaitan adanya normalisasi hubungan dengan kritik dan penolakan yang dilakukan oleh Palestina yang menanggapi normalisasi hubungan yang terjadi akan menghilangkan solidaritas negara-negara Arab dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina (Muhamad, 2020). Dan yang terakhir, penelitian Raden Mas Try Ananto Djoko Wicaksono yang berjudul “*Analisis Kebijakan Uni Emirat Arab dalam Normalisasi Hubungannya dengan Israel*” menjelaskan dari aspek kepentingan Uni Emirat Arab terhadap Israel dalam normalisasi hubungan yang disepakati, juga memberikan penjelasan mengenai tanggapan negara muslim lain terkait kebijakan normalisasi hubungan yang disepakati yang berdampak pada solidaritas negara muslim dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Dalam penelitiannya, penulis menggunakan konsep kepentingan nasional dan konsep realpolitik yang menghasilkan data bahwa Uni Emirat Arab memiliki minat yang dalam untuk memperluas kerjasamanya dengan Israel di berbagai bidang, terutama dalam bidang politik dan keamanan (R. M. T. A. D. Wicaksono, 2020). Dengan adanya kekosongan dari penelitian-penelitian terdahulu, penelitian ini membawakan fokus penelitian yang baru dan berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya terkait topik normalisasi hubungan antara Uni Emirat Arab dengan Israel yang berfokus menganalisa normalisasi hubungan antara Uni Emirat Arab dengan Israel merupakan sebuah respon kebijakan Uni Emirat Arab dalam menghadapi ancaman yang diberikan oleh Iran di Kawasan Timur Tengah yang dianalisa menggunakan kerangka teori *Balance of Threat*

Teori *Balance of Threat* merupakan sebuah teori yang mencoba menyempurnakan teori terdahulu yakni *Balance of Power*. Sebelum teori *Balance*

of Threat hadir, kebanyakan penstudi atau pakar hubungan internasional lazim menggunakan teori *Balance of Power* sebagai alat analisis dalam menelaah sebuah fenomena yang berkaitan dengan aliran neorealisme. Teori *Balance of Power* sendiri muncul pertama kali dikemukakan oleh seorang pakar hubungan internasional yakni Kenneth N. Waltz yang dituangkannya dalam buku berjudul *Theory of International Politics*. Teori *Balance of Power* memiliki asumsi-asumsi yang selaras dengan pendekatan neorealisme yakni: pertama, negara merupakan aktor yang rasional dan memiliki kehendak sendiri dalam hal pemenuhan kepentingan nasionalnya; kedua, sistem internasional berbentuk anarki yang mana maknanya yaitu tidak ada aktor lain diatas negara dan negara merupakan aktor tertinggi; ketiga, kapabilitas (*power*) menjadi pembeda bagi setiap negara dimana dalam sistem anarki kapabilitas itu adalah hal yang paling dilihat bagaimana negara tersebut bisa menguasai atau mempengaruhi negara lainnya dalam hal kemajuan, kekayaan, dan perdamaian (Waltz, 1979)

Dalam hal penyeimbangan atau *balancing*, *Balance of Power* memusatkan pada tingkat kapabilitas militer sebagai variabel dalam hal menganalisis sebuah fenomena ketika suatu negara memiliki kekuatan militer yang besar dan mengakibatkan negara lain terancam akan kehadiran negara tersebut sehingga mengundang negara lainnya untuk melakukan perimbangan kekuatan (Waltz, 1979). Lain halnya *Balance of Power*, *Balance of Threat* sebagai sebuah teori yang berusaha merevisi pandangan dari *Balance of Power* memusatkan faktor suatu negara melakukan penyeimbangan adalah karena adanya ancaman yang hadir terhadap suatu negara lainnya sehingga negara lainnya merespon karena adanya

ancaman. Walt (1987) tidak menafikan jika variabel distribusi kekuatan yang ditekankan oleh *Balance of Power* itu sangatlah penting dalam hal *balancing* namun terdapat variabel-variabel lainnya yang dapat membuka perspektif bagaimana suatu negara melakukan kebijakan penyeimbangan.

Teori *Balance of Threat* pada dasarnya ingin menjelaskan mengenai adanya hubungan sebab akibat mengenai suatu ancaman yang dihadirkan oleh suatu negara yang berdampak pada negara lainnya yang merasa terancam melakukan aliansi untuk mengimbangi ancaman yang hadir. Menurut Walt (1987), negara dapat dikatakan mengancam negara lain adalah ketika terpenuhinya variabel yang ada dalam indikator *source of threat* atau sumber ancaman. Variabel-variabel tersebut yakni *aggregate power*, *geographic proximity*, *offensive power*, dan *aggressive intention*. Berikut ini penjelasan dari variabel-variabel *source of threat*.

- a. *Aggregate power* merupakan variabel yang menjelaskan berkenaan dengan kekuatan relatif suatu negara untuk mengancam negara lainnya. Kekuatan ini berupa sumber daya yang dimiliki oleh negara tersebut seperti ekonomi, populasi, kapabilitas industri militer, dan kemajuan teknologi. Dalam variabel ini jika semuanya telah terpenuhi dengan melalui perbandingan antara negara pengancam dan yang terancam maka identifikasi ancaman akan semakin besar.
- b. *Geographical proximity* merupakan variabel yang menjelaskan bahwa kedekatan geografis dapat menyebabkan ancaman semakin besar. Semakin dekat suatu negara dengan negara lainnya maka ancaman akan semakin besar.

- c. *Offensive power* merupakan variabel kunci yang menjelaskan kekuatan ofensif suatu negara yang dapat memungkinkan untuk memprovokasi negara lain. Terdapat beberapa aspek yang menjadi indikator dalam hal *offensive power* ini yakni jumlah prajurit, kendaraan, dan persenjataan.
- d. *Aggressive intention* merupakan variabel yang menjelaskan mengenai tindakan agresif atau niatan bertindak agresif yang dapat memicu negara lain melakukan perlawanan terhadap ancaman yang mereka terima. Niatan (*intention*) memiliki peranan krusial dalam membentuk persepsi suatu negara. Jika suatu negara memiliki niatan agresif maka dapat memunculkan persepsi bahwa negara tersebut akan mengancam negaranya. Semakin tinggi niatan agresif nya suatu negara maka ancaman yang dihadirkan akan semakin besar.

Negara dapat sah dan teridentifikasi sebagai ancaman setelah ke-empat variabel itu terpenuhi. Walt (1987) menjelaskan bahwa jika ancaman telah teridentifikasi maka yang dilakukan oleh negara yang terancam tersebut adalah melakukan aliansi. Menurut Walt (1987), aliansi adalah kesepakatan yang terjadi antara dua negara atau lebih untuk bekerjasama dalam hal keamanan baik itu secara formal maupun informal. Walt (1987) mengelompokkan aliansi ke dalam dua kategori yakni *balancing* dan *bandwagoning*.

Balancing merupakan sebuah langkah yang menunjukkan perimbangan suatu negara ketika negaranya merasa mendapati ancaman dari negara lain dengan membentuk aliansi bersama negara lainnya diluar dari negara yang mengancam. Negara memilih melakukan *balancing* ketika terjadi dua hal yakni yang pertama

jika negara yang terancam tidak berhasil mencegah ancaman atau diserang oleh negara lainnya maka konsekuensinya negara tersebut harus rela didominasi oleh negara yang memberikan ancaman sehingga pilihan rasionalnya adalah negara melakukan *balancing* dengan beraliansi. Lalu yang kedua, negara yang relatif kuat akan beraliansi dengan negara yang lebih lemah untuk mengurangi potensi ancaman sehingga negara ancaman tidak datang pada negara tersebut. Selain itu pada kondisi yang kedua tersebut negara akan mendapati keuntungan jika beraliansi dengan negara yang lebih lemah yakni negara tersebut dapat memberikan pengaruh dan mendominasi pada aliansi yang dibentuk. Walt (1987) menambahkan terdapat dua hal pola pemilihan dalam hal beraliansi untuk menghadapi ancaman yakni yang pertama negara yang lebih kuat cenderung akan beraliansi dengan negara yang lebih lemah hal ini dilakukan agar tidak didominasi dan bisa menyebarkan pengaruh dan yang kedua dalam kondisi negara yang lebih lemah hal yang dilakukan adalah sebaliknya yakni beraliansi dengan negara yang lebih kuat agar bisa membantu menghindarinya dari ancaman (Walt, 1987).

Respon suatu negara dalam hal beraliansi selain *balancing* adalah *bandwagoning*. *Bandwagoning* merupakan suatu upaya yang dijalankan oleh suatu negara yang terancam dengan cara bergabung atau beraliansi dengan negara yang menjadi sumber ancaman tersebut. Terdapat dua hal yang menjadi pertimbangan mengapa negara melakukan *bandwagoning* yakni yang pertama negara melakukan hal ini sebagai bentuk agar ancaman dapat mereda dan dapat diarahkan ke pihak lain. Yang kedua yakni perilaku ini biasanya terjadi dalam hal peperangan, setiap negara atau aktor tentunya ingin memenangkan peperangan, oleh karena itu negara

akan melakukan *bandwagoning* dengan negara yang kuat meskipun negara tersebut merupakan ancaman bagi mereka untuk memenangkan peperangan dan mendapatkan keuntungan (1987).

Dari penjelasan yang telah dipaparkan, konsep dari *Balance of Threat* sangat sesuai dan cocok dengan fenomena yang penulis teliti untuk menganalisis mengapa UEA melakukan normalisasi dengan Israel untuk merespon ancaman yang dapat membahayakan UEA.

1.6 Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi konsep merupakan sebuah cara untuk menguraikan konsep penelitian menjadi beberapa bagian agar dapat memudahkan dalam hal pemahaman dan pengukuran. Setiap konsep lazimnya diberikan definisi operasional yang mana perlu untuk menguraikan konsep menjadi bagian yang lebih spesifik agar dapat diukur. Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan mengenai Teori *Balance of Threat* maka dapat ditentukan operasionalisasi konsepnya yakni *source of threat* dan *balancing*.

1.6.1 *Source of threat*

Source of threat atau sumber ancaman merupakan salah satu elemen penting dalam Teori *Balance of Threat*. Sumber ancaman menjadi indikator untuk mengukur apakah suatu negara dapat menjadi ancaman atau tidak. Di dalam *source of threat* terdapat empat variabel yang harus diukur yakni *aggregate power*, *geographic proximity*, *offensive power*, dan *aggressive intention*. Operasionalisasi *source of threat* dalam penelitian ini akan menjadi alat untuk mengidentifikasi ancaman. Penulis akan menggunakan *source of threat* ini untuk menentukan apakah

Iran merupakan ancaman bagi UEA sehingga UEA melakukan normalisasi dengan Israel. Penulis akan menguraikan dengan detail ke-empat variabel yang ada dalam *source of threat* dengan cara membandingkan kedua negara yakni UEA dan Iran. Adanya perbandingan yang ditampilkan berdasarkan data yang konkrit sesuai dengan indikator *source of threat* diharap dapat menganalisa dan mencari tahu latar belakang terjadinya normalisasi.

1.6.2 *Balancing*

Balancing adalah strategi yang digunakan oleh suatu negara untuk menyeimbangkan kekuatan ketika menghadapi ancaman dari negara lain. Ini dilakukan dengan membentuk aliansi dengan negara atau kelompok aliansi yang tidak terkait dengan sumber ancaman tersebut. *Balancing* juga merupakan respons dari negara yang merasa terancam ketika ada kekuatan yang mengancamnya. Dengan demikian, negara tersebut mencari dukungan dari entitas lain untuk memperkuat posisi dan meningkatkan kekuatan mereka secara kolektif sebagai respons terhadap ancaman yang mereka hadapi. Sebagai sebuah konsep, *balancing* akan penulis gunakan untuk menguraikan mengenai aliansi yang terbentuk antara UEA dan Israel. Penulis akan menguraikan bagaimana Israel menjadi negara yang kuat dan cocok untuk beraliansi dengan UEA dengan perannya menjadi penyeimbang untuk mencegah negara yang mengancam menyerang UEA.

1.6.3 Normalisasi Hubungan Internasional

Normalisasi hubungan internasional merujuk pada proses di mana dua negara yang sebelumnya mengalami ketegangan atau konflik, mengubah sikap mereka dan memulai kembali hubungan diplomatik yang lebih positif dan

konstruktif. Normalisasi ini bisa mencakup pembukaan kedutaan besar, negosiasi perjanjian bilateral, kerjasama ekonomi, dan saluran komunikasi yang lebih efektif antara negara-negara yang terlibat

Secara umum, normalisasi dapat dilihat sebagai upaya untuk mengatasi perbedaan dan membuka peluang untuk dialog dan kerja sama di berbagai bidang. Konsep ini juga dapat diterapkan pada hubungan antara negara dengan ideologi atau kepentingan yang sangat berbeda. Normalisasi hubungan di definisikan sebagai "The process of establishing or reestablishing diplomatic relations and cooperation between two or more countries, often after a period of estrangement or conflict"

Terdapat faktor-faktor yang mendorong terjadinya Normalisasi Hubungan. Pertama, ialah keinginan untuk mengurangi ketegangan sering kali mencari jalan untuk mengurangi eskalasi situasi yang bisa mengancam keamanan atau stabilitas mereka. Proses normalisasi hubungan merupakan Langkah strategis untuk mencapai stabilitas lebih lanjut. Kedua, adalah kebutuhan ekonomi. Kerjasama ekonomi dan perdagangan merupakan faktor pendorong utama. Negara-negara yang sebelumnya terisolasi secara diplomatik mungkin mulai mencari peluang untuk membuka pasar baru, memperkuat kerjasama ekonomi, atau mengakses sumber daya yang dimiliki oleh negara lain. Yang ketiga adalah Perubahan Kepemimpinan atau Ideologi, dimana perubahan dalam kepemimpinan atau perubahan ideologi politik bisa menciptakan suasana yang lebih kondusif untuk negosiasi dan normalisasi. Contohnya, perubahan pemerintahan di negara tertentu bisa mengarah pada kebijakan luar negeri yang lebih pragmatis atau terbuka untuk kerjasama. Dan yang terakhir adalah Perubahan dalam Lingkungan Internasional.

Terkadang, faktor eksternal seperti tekanan internasional, aliansi baru, atau dinamika geopolitik yang berubah dapat memaksa negara untuk menyesuaikan kebijakan luar negerinya, termasuk untuk melakukan normalisasi hubungan dengan negara tertentu (Barston, 2019).

1.7 Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah kebijakan Uni Emirat Arab dalam menormalisasi hubungan dengan Israel merupakan sebuah respon oleh adanya ancaman yang diberikan oleh Iran terhadap Uni Emirat Arab di kawasan Timur Tengah. Ancaman tersebut menyebabkan Uni Emirat Arab melakukan strategi *balancing* guna menjaga eksistensi mereka di kawasan Timur Tengah melalui keputusan untuk beraliansi dengan Israel yang dianggap memiliki *power* yang kuat untuk membantu Uni Emirat Arab dalam menjaga keseimbangan dan menghadapi kekuatan Iran di kawasan.

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini digunakan untuk membuat penelitian menjadi terstruktur. Metode penelitian akan dijabarkan sebagai berikut:

1.8.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe eksplanatif yang berusaha untuk menjelaskan respon Uni Emirat Arab terhadap ancaman yang diberikan Iran di Kawasan Timur Tengah melalui normalisasi hubungan dengan Israel. Lalu, pengertian metode penelitian kualitatif ialah penelitian yang bersifat eksplorasi dan penelitian yang bertujuan untuk mencari sebab-akibat dari suatu fenomena yang diteliti (Hancock, 2006, p. 11).

1.8.2 Situs Penelitian

Situs penelitian merupakan tempat dilaksanakannya penelitian, dalam hal ini situs penelitian berada di Kota Semarang Jawa Tengah dan Kota Brebes, Jawa Tengah

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah kebijakan Pemerintah Uni Emirat Arab yang berkaitan dengan normalisasi hubungan antara Uni Emirat Arab dan Israel pada tahun 2020

1.8.4 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan sesuai dengan riset dan metodologi yang dilakukan oleh peneliti itu secara langsung, sedangkan data sekunder merupakan data tangan kedua dari publikasi penelitian terdahulu yang telah dikumpulkan oleh peneliti sebelumnya dan bisa dimanfaatkan untuk menjawab pertanyaan penelitian (P. Johnston, 2014). Data sekunder yang digunakan didapatkan dari jurnal, media, wawancara media, dan media berita yang membahas mengenai normalisasi hubungan antara Uni Emirat Arab dengan Israel pada tahun 2020.

1.8.5 Sumber Data

Data dikumpulkan dari berbagai situs di internet seperti Youtube, situs resmi pemerintah Uni Emirat Arab dan Israel seperti Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri, dan media-media berita timur tengah seperti Al-Jazeera,

SIPRI, Haaretz, CNN, BBC dan situs berita lainnya. Selain itu, untuk studi literatur dilakukan dengan mengkaji jurnal-jurnal penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan normalisasi hubungan Uni Emirat Arab dengan Israel baik dari perspektif pihak negara Uni Emirat Arab, perspektif negara Israel, perspektif negara Iran dan negara-negara Arab lainnya.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau *desk research*. Teknik studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang tidak mengharuskan peneliti untuk turun langsung ke lapangan. Sehingga, penulis menggunakan berbagai macam sumber literatur dari jurnal dan artikel dalam bentuk digital yang ada pada media internet dengan memperhatikan kredibilitas sumber-sumber yang digunakan (Hague, 2006). Dalam mengumpulkan data penelitian, peneliti akan mengkaji jurnal atau artikel penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan normalisasi hubungan Uni Emirat Arab dengan Israel pada tahun 2020

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data yang dalam penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan metode kongruen. Metode kongruen merupakan metode yang dilakukan dengan mencari kesesuaian antara data-data yang digunakan dalam penelitian dengan asumsi teori dan konsep yang digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian (Rosyidin, 2019). Data-data penelitian yang dihasilkan menggunakan teknik pengumpulan data *desk research* akan diinterpretasikan sesuai

dengan teori atau konsep yang digunakan dalam penelitian ini yang berfokus pada interpretasi dalam studi kasus respon Uni Emirat Arab terhadap ancaman yang diberikan oleh Iran di Kawasan melalui normalisasi hubungan antara Uni Emirat Arab dengan Israel pada tahun 2020 menggunakan teori *Balance of Threat* yang didalamnya terdapat empat variabel sebagai alat analisis dalam menghasilkan kesimpulan penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari jenis data sekunder seperti jurnal-jurnal terdahulu yang membahas normalisasi hubungan antara Uni Emirat Arab dengan Israel akan disaring sesuai dengan teori *Balance of Threat*.

BAB II

POLITIK LUAR NEGERI UNI EMIRAT ARAB DAN DINAMIKA HUBUNGANYA DENGAN ISRAEL

Dinamika hubungan antara Uni Emirat Arab dengan Israel sebelum adanya kesepakatan normalisasi hubungan banyak mengalami perubahan dikarenakan sering berubahnya arah dan tujuan politik luar negeri baik dari Uni Emirat Arab atau Israel yang berkaitan dengan terciptanya kesepakatan normalisasi hubungan antara kedua negara tersebut. Pada bab ini penulis membahas beberapa poin penting sebagai gambaran umum seperti pembahasan mengenai dinamika hubungan Uni Emirat Arab dengan Israel sebelum adanya kesepakatan normalisasi hubungan antara Uni Emirat Arab dengan Israel pada tahun 2020. Pembahasan tersebut guna melihat bagaimana dinamika dan perkembangan hubungan Uni Emirat Arab dengan Israel pada periode waktu sebelum adanya kesepakatan normalisasi hubungan hingga periode waktu disepakatinya normalisasi hubungan antara kedua negara tersebut. Bab ini juga akan membahas mengenai respon-respon yang diberikan oleh negara-negara Arab atas terjadinya normalisasi UEA-Israel. Terakhir, bab ini akan memuat penjelasan dinamika hubungan Uni Emirat Arab dengan Iran sebagai negara yang berkaitan dan mempengaruhi kebijakan UEA untuk normalisasi hubungan dengan Israel khususnya pada periode waktu sebelum terjadinya kesepakatan tersebut. Diakhir pembahasan, penulis akan menyimpulkan hasil dari pembahasan bab ini sehingga bisa diketahui secara ringkas penjelasan dari bab ini.

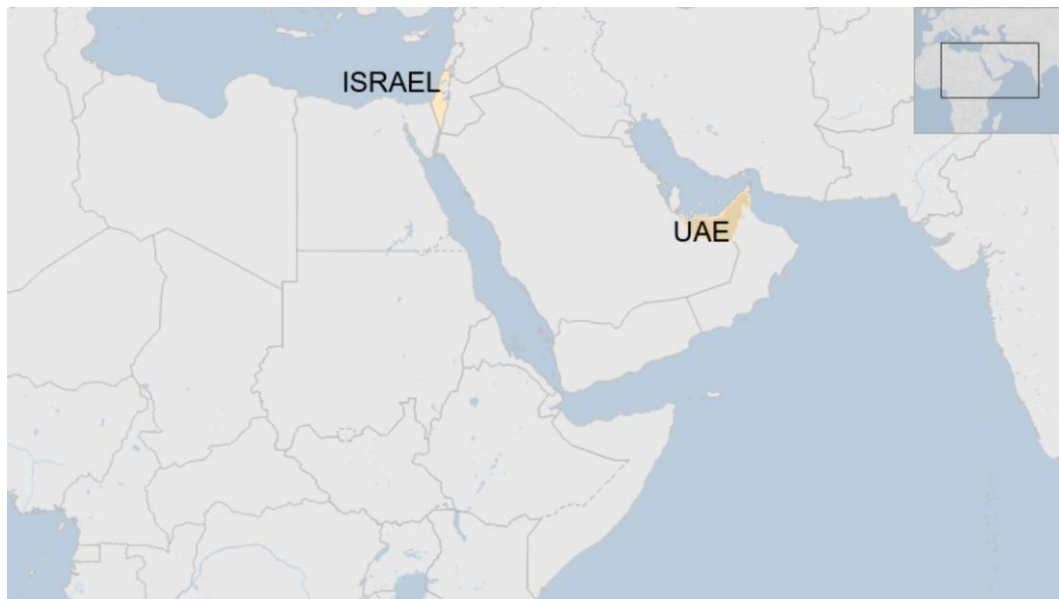
2.1 Perkembangan Hubungan UEA dengan Israel

2.1.1 Sebelum Normalisasi

Hubungan Uni Emirat Arab dengan Israel terbilang rumit karena konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina. Sebagai negara Arab tentunya UEA berada di pihak Palestina dengan mendukung kemerdekaan Palestina. Konflik Israel dan Palestina sendiri telah berlangsung selama bertahun-tahun bahkan sejak tahun 1948 (Murphy dkk, 2021). Dalam sejarahnya, UAE tidak pernah ikut campur secara langsung menyerang Israel dalam hal peperangan seperti yang dilakukan oleh negara-negara Arab lainnya. Namun upaya UEA dalam keberpihakannya pada Palestina dilakukan melalui politik dan kebijakan-kebijakan yang condong pada Palestina dibandingkan pada Israel.

Israel dan UEA secara geografis terletak berjauhan dimana UEA berada di Teluk Persia dan Israel berada di ujung timur Laut Mediterania di Asia Barat. Kondisi geografis kedua negara terhalang oleh negara Arab lainnya seperti Arab Saudi dan Yordania. Kedua negara tersebut berjarak 2,548 km. Dengan kondisi tersebut konflik yang terjadi antara Israel dan UEA sangat kecil kemungkinannya untuk terjadi.

Gambar 2.1 Gambaran Geografis Israel dan Palestina



Sumber: BBC (2020)

Selain faktor wilayah dari kedua negara tersebut yang saling berjauhan, faktor perbedaan system negara juga ikut mempengaruhi hubungan kedua negara tersebut, yaitu Uni Emirat Arab yang merupakan negara dengan sistem monarki dengan masyarakatnya mayoritas merupakan Arab Sunni namun setengah populasi negara ini adalah ekspatriat dari berbagai bangsa. Sementara itu, Israel menggunakan sistem demokrasi, masyarakatnya mayoritas Yahudi dari berbagai bangsa dan warga Arab sebagai minoritas yang juga merupakan keturunan Palestina.

Amerika Serikat sebagai *super power* dalam dunia internasional memainkan peranan penting dalam hubungan antara UEA dan Israel. Kedua negara tersebut sangat dekat dengan Israel dan disebut sebagai negara yang *pro-American*. Amerika Serikat bahkan terus menjaga hubungannya dengan UEA dengan adanya kerjasama strategis seperti kepentingan ekonomi dan keamanan. Meskipun keduanya terlihat

dekat dengan Amerika Serikat, hubungan Israel dan UEA di kawasan tidak bisa dikatakan baik. UEA mendukung penuh Liga Arab dan Gulf Cooperation Council's (GCC) dan dengan sikap mereka terhadap Israel atas konflik yang terjadi antara kedua negara yang telah berlangsung bertahun-tahun sejak 1948. Sebagai konsekuensi dari keikutsertaan dalam Liga Arab dan GCC dan terhadap Arab Peace Initiative, UEA menolak untuk mengakui Israel sebagai negara yang berdaulat dan melarang masuknya warga negara Israel di wilayah UEA sesuai dengan upaya boikot yang dilakukan oleh Liga Arab.

Sejak dibentuknya GCC pada tahun 1981, negara-negara yang tergabung didalamnya seperti Kuwait, Bahrain, Arab Saudi, Oman, Qatar, dan juga UEA memiliki kesamaan posisi dalam konflik Israel dan Palestina yakni memboikot Israel dan hanya mendukung Palestina. UEA telah banyak memboikot Israel dan mengutuk kebijakan Israel terhadap permasalahan Palestina dan merasa bahwa hal ini harus dihentikan untuk kemanusiaan karena konflik terus menambah korban jiwa. Untuk membantu meredakan konflik, UEA mendukung adanya inisiasi perdamaian berdasarkan pada Arab Peace Initiative (API) yang di inisiasi oleh Arab Saudi pada 2002. UEA dan negara Arab lainnya mengedepankan *two-states solution* sebagai kunci untuk mengatasi masalah Israel dan Palestina. Hingga saat ini, solusi ini tidak pernah disepakati dan konflik masih terus berlangsung.

Israel, sebagai sebuah negara, tidak pernah diakui keberadaannya oleh UEA karena merasa Israel telah merebut wilayah yang dikhususkan untuk penduduk Palestina. Hal ini mengakibatkan tidak ada hubungan diplomatik secara resmi antara Israel dan UEA. Namun terdapat temuan yang menarik dari hubungan Israel

dan UEA ini dimana keduanya tercatat bertemu dan bekerjasama dalam beberapa kepentingan seperti kepentingan politik, keamanan, dan ekonomi. Dalam hal kepentingan politik, terdapat beberapa pertemuan yang diduga bermuatan politis antara kedua negara. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya pertemuan rahasia antara Perdana Menteri Israel Netanyahu dan Menteri Luar Negeri UEA Sheikh Abdullah bin Zayed al-Nahyan yang terjadi pada bulan September 2012 selama dilaksanakannya Sidang Umum PBB di New York dan baru dilaporkan beberapa tahun kemudian oleh Haaretz. Pertemuan tersebut berlangsung membahas kepentingan bersama kedua negara untuk menggagalkan rencana nuklir Iran. (Ravid, 2017) Pertemuan lainnya yang mengindikasikan ada kepentingan politik berlangsung di UEA pada November 2015 dimana Direktur Jendral Kementrian Luar Negeri, Dore Gold, melakukan kunjungan ke UEA. Kunjungan tersebut diketahui memiliki tujuan untuk membahas pembukaan kantor misi Israel untuk International Renewable Energy Agency (IRENA). (Ravid, 2015) Menanggapi persoalan IRENA, Maryam Khalifa Al-Falasi, Kepala Komunikasi dan Media Kementrian Luar Negeri UEA, mengklarifikasi pertemuan tersebut. IRENA merupakan lembaga internasional yang independent dan memiliki aturan tersendiri sehingga pertemuan tersebut tidak ada kaitannya dengan hubungan baik yang sedang berlangsung sekaligus mempertahankan status quo bahwa posisi UEA terhadap Israel tidak berubah. Meskipun sudah disanggah bahwa hal tersebut merupakan pertemuan biasa dan sifatnya independent tetapi bukan tidak mungkin ada agenda-agenda lain yang dibahas. (R. T. A. D. Wicaksono, 2020)

Dalam hal kepentingan keamanan, angkatan udara Israel dan UEA beberapa kali terlibat aktif mengikuti latihan militer bersama yang disponsori oleh Amerika Serikat dan Italia. Setidaknya Israel dan UEA terlihat aktif menjalankan latihan militer bersama sebanyak tiga kali dan ini merupakan jumlah yang tidak sedikit dan suatu keanehan dimana UEA yang dipercaya masih belum mengakui kedaulatan Israel. (Kirkpatrick, 2019) UEA disebut memiliki fokus untuk mengembangkan angkatan udaranya karena angkatan udaranya masih jauh dari kata bagus untuk menghadapi berbagai gejolak di kawasan. Dalam berbagai laporan terkait militer, UEA disebut membeli drone milik Israel dan produk keamanan lainnya untuk angkatan udara. Kepentingan keamanan yang dijalin antara UEA, Israel dan Amerika Serikat dipergunakan untuk meningkatkan kekuatan di kawasan dalam rangka merespon konflik-konflik yang terjadi di beberapa negara terdekat seperti Afghanistan, Yaman, dan Libya (Kirkpatrick, 2019). Selain meningkatkan keamanan di udara, UEA juga menjalin kerjasama dengan Israel dalam hal keamanan siber dan penyediaan alat-alat intelijen. Kerjasama tersebut dilansir memiliki nilai yang sangat besar untuk ukuran keamanan siber dan penyediaan alat intelijen dengan taksiran nominalnya mencapai 3 miliar dollar (Cafiero & Sudetic, 2020).

Dalam hal kepentingan ekonomi, UEA aktif mengimpor berbagai macam komoditas dari Israel untuk pemenuhan kebutuhan dalam negerinya. Jenis komoditas yang diimpor oleh UEA dari Israel yakni peralatan medis, telekomunikasi, bahan mentah, produk pertahanan, besi dan teknik, jasa konsultasi, dan produk hasil pertanian serta pangan. Namun, karena secara politik Israel dan

UEA belum memiliki hubungan yang resmi maka barang-barang tersebut tidak diberi label atau penanda produk buatan Israel demi menjaga kerahasiaan produk tersebut berasal dari Israel. Perusahaan Israel yang mengirim barang-barang tersebut memahami adanya pencopotan label pada barang-barang dari Israel hal ini memang karena adanya pelarangan perdagangan dengan Israel. Namun, tetap saja dalam praktiknya hal tersebut tidak diberlakukan dengan ketat (Zaga, 2018).

Dua dekade terakhir menjadi titik dimana UEA mulai melunak untuk menerima Israel sebagai sebuah negara yang berdaulat. UEA diam-diam mulai aktif untuk melakukan kontak dan kerjasama dalam hal politik, keamanan dan ekonomi. Kerjasama tersebut dinilai menguntungkan UEA dan Israel karena dapat meningkatkan kemampuan suatu negara utamanya dalam hal ekonomi dan keamanan sehingga normalisasi yang terjadi pada 13 Agustus 2020 tersebut menjadi momentum untuk menyatukan keduanya.

2.1.2 Sesudah Normalisasi

Tahun 2020 menjadi momen bersejarah bagi UEA dan Israel dimana keduanya melakukan kesepakatan perdamaian setelah disetujuinnya Abraham Accord yang diprakasai oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bentuk normalisasi antara kedua negara yang mana nantinya akan tercipta hubungan diplomatik dan membuka kantor kedutaan beserta perwakilan diplomatik di masing-masing negara sebagai bentuk keduanya memiliki hubungan yang baik dan siap melakukan serangkaian hubungan kerjasama yang menguntungkan. Terdapat beberapa aspek yang telah disepakati sejauh ini yakni yang pertama UEA dan Israel setuju untuk membangun

hubungan ekonomi dan diplomatik secara penuh dengan nantinya akan ada perwakilan dari masing-masing negara untuk menandatangani perjanjian bilateral perihal pariwisata, investasi, keamanan, penerbangan langsung dan lain-lain. Yang kedua yakni UEA dan Israel beserta Amerika Serikat berencana menjalankan agenda strategis untuk kawasan Timur Tengah sebagai bentuk perluasan kerjasama diplomatik, keamanan, dan perdagangan. Dan yang terakhir yakni Israel wajib menunda rencananya untuk melakukan ekspansi di bagian Tepi Barat atau West Bank dan juga memberikan hak bagi warga UEA untuk berkunjung dan berdoa di Masjid Al-Aqsa (Haaretz, 2020).

Israel sebagai sebuah negara yang maju dapat memberikan keuntungan bagi siapapun yang bekerjasama dengannya termasuk pada UEA. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kesepakatan normalisasi UEA dan Israel ini akan menciptakan kerjasama-kerjasama baru baik itu dari segi politik, ekonomi dan yang paling penting dari segi keamanan. Pasca terciptanya normalisasi UEA aktif bekerjasama dengan Israel dalam penguatan pertahanan. Berdasarkan laporan dari Breaking Defense, UEA tertarik untuk membeli sistem keamanan berupa radar Green Pine dengan versi yang lebih unggul. Green Pine merupakan sistem Arrow Israel yang fungsinya dirancang untuk mencegah rudal balistik. Green Pine akan sangat bermanfaat bagi sistem keamanan UEA karena dengan hadirnya Green Pine ini UEA mampu mengantisipasi serangan misil yang diarahkan pada teritorialnya. (Egozi, 2022) Selain sistem radar, UEA juga memiliki minat untuk memiliki teknologi keamanan siber dan peralatan militer Israel karena dianggap jauh lebih maju (Tehran Times, 2022).

Normalisasi yang terjadi menguntungkan UEA dalam hal kemaritiman dimana UEA mengamankan jalur maritim di selat Bab el Mandeb. UEA dan Israel sepakat untuk berbagi kendali atas pulau Sokotra dalam rangka perluasan operasi intelijen bersama (Warleman, 2021). Hal tersebut dijelaskan lebih lanjut oleh media Democracy for The Arab World Now (DAWN) yang menuliskan bahwa Yayasan UEA dan The Red Crescent telah sepakat untuk menandatangani perjanjian dengan perusahaan Israel untuk memperluas bandara Hidaybu yang mana bandara tersebut digunakan oleh pasukan militer UEA dan Israel untuk melakukan operasi intelijen angkatan udara dan laut. Pengamanan jalur maritim tersebut sangat menguntungkan UEA karena dapat meningkatkan pemantauannya di selat yang terkenal dengan arus perdagangan yang tinggi (Cafiero, 2021).

Sektor ekonomi menjadi keuntungan lainnya yang didapatkan dari normalisasi ini baik itu bagi Israel maupun UEA. Kesepakatan ekonomi sejauh ini yang terjalin yakni adanya kemungkinan 95% produk dari kedua negara yang diperdagangan akan bersifat bebas bea dan cukai dengan kata lain akan terjadi perdagangan bebas dan pastinya dapat meningkatkan penjualan produk masing-masing negara. Kesepakatan tersebut dinamai sebagai the Milestone Deal yang menekankan bahwa perdagangan antara kedua negara harus meminimalisir hambatan pada kegiatan ekspor-impor kedua negara seperti mengurangi atau menghapus tarif pada berbagai produk, mempromosikan arus investasi dan juga meningkatkan akses terhadap pasar. Perjanjian ini dipercaya dapat memberikan dampak positif yakni meningkatkan jumlah lapangan kerja dan meningkatkan aktivitas ekonomi sehingga dapat memberikan pertumbuhan ekonomi bagi kedua

negara (Reuters, 2022). Selain perdagangan bebas, UEA dan Israel telah menyepakati perjanjian investasi senilai 10 miliar dollar yang ditujukan untuk beberapa sektor yang strategis di Israel. Kesepakatan ini mendorong kemajuan sosial-ekonomi dan meningkatkan hubungan ekonomi kedua negara sebagaimana kesepakatan yang disetujui pasca perjanjian Abraham Accord (The Arab Weekly, 2021).

2.2 Respon Negara-Negara Arab terhadap Normalisasi Hubungan UEA-Israel

Keputusan UEA menyepakati normalisasi hubungan dengan Israel menuai banyak pro dan kontra. Beberapa negara seperti Kanada, Inggris, Mesir, Bahrain, Yordania, Prancis dan Inggris menyambut baik dan mendukung penuh normalisasi UEA dan Israel. Dukungan tersebut dilontarkan oleh para pemimpin negara dengan memberikan pernyataan kepada media. Presiden Mesir, Abdul Fattah al-Sisi, menyatakan sangat menghargai atas hadirnya normalisasi ini dan menganggap ini sebagai suatu jalan untuk mencapai kemakmuran dan stabilitas di kawasan. Abdul Fattah juga menanggapi terkait dengan kebijakan normalisasi ini yang ada kaitannya dengan Palestina dimana beliau sangat mengapresiasi peran dari pada Amerika Serikat, UEA, dan Israel yang bersepakat untuk menghentikan ekspansi yang dijalankan oleh Israel di Tepi Barat dengan mempertimbangkan langkah-langkah untuk menghadirkan perdamaian di Kawasan (Reuters, 2020).

Pemerintah Yordania mengatakan dukungan yang serupa bahwa kesepakatan yang berlangsung dapat mendorong perdamaian yang sempat terhenti dan UEA bisa mendorong Israel untuk menerima Palestina sebagai suatu negara dan sepakat dengan two state solution. Menteri Luar Negeri Yordania memberikan

pernyataan tambahan mengenai sikap Yordania bahwa jika Israel berkehendak untuk menerima beberapa persetujuan untuk mengakhiri okupasi maka yang akan terjadi adalah terciptanya perdamaian di kawasan. (Reuters, 2020b) Senada dengan pendapat Yordania dan Mesir, beberapa negara seperti Bahrain dan Inggris melalui kepala pemerintahannya pun sangat menyambut baik dan mendorong terjadinya perdamaian di kawasan terlebih perdamaian Israel dan Palestina. Selain itu, keputusan yang ada pada normalisasi yakni menghentikan ekspansi di Tepi Barat juga menuai apresiasi dan merupakan langkah positif.

Selain tanggapan positif dari beberapa negara terkait dengan normalisasi ini, beberapa negara lainnya bertindak sebaliknya dengan respon secara negatif dan mengecam keputusan UEA. Beberapa negara yang merespon dengan negatif yakni Iran, Qatar, dan Aljazair yang mana ketiganya merupakan negara Arab dan masih satu rumpun dengan UEA. Sebagai negara yang bertetangga dengan UEA, Iran melalui menteri luar negerinya, Muhammad Javad Zarif, menyebut UEA saat ini mitra “kejahatan Israel”. Zarif juga menambahkan bahwa keputusan tersebut akan berpengaruh pada stabilitas keamanan di kawasan dan memberikan ancaman. Selaras dengan pernyataan Zarif, Ayatollah Ali Khomeini sebagai Pemimpin Tertinggi Iran mengatakan bahwa UEA kini telah mengkhianati kepercayaan muslim. (MEPEI, 2020) Presiden Iran, Rouhani, memperingati UEA jika nantinya perjanjian tersebut bertujuan untuk perluasan pengaruh Israel di kawasan, maka Iran akan bertindak dan tidak akan mentolerir UEA (BBC, 2020).

Qatar memberikan respon terhadap normalisasi tersebut dengan sindiran berupa peningkatan simpati Qatar terhadap Palestina melalui pengiriman bantuan

bulanan senilai 30 juta dollar kepada para penduduk yang ada di Gaza dan mendukung Khaled Mashal sebagai pimpinan Hamas (The Times of Israel, 2018). Di Aljazair, sekelompok masyarakat sipil dan beberapa partai politik menyatakan sikap terhadap UEA dengan mengutuknya dan menyebut perjanjian yang disepakati itu sebagai bentuk pengkhianatan terhadap perjuangan Palestina yang telah berlangsung selama puluhan tahun (MEPEI, 2020). Timbulnya asumsi pengkhianatan ini tidak lepas dari pada peran UEA terhadap Palestina yang telah dilakukan bertahun-tahun. UEA dianggap oleh Palestina telah menunjukkan solidaritasnya dengan memberikan aspirasi dan dukungan terhadap Palestina. Palestina dan UEA sendiri merupakan bagian dari Liga Arab dan forum regional lainnya. UEA memiliki kedutaan besar di Palestina dan warga negara Palestina banyak juga yang tinggal dan bekerja di UEA (Nusseibeh, 2014). Dukungan UEA dibuktikan dengan adanya ketegasan untuk memperjuangkan Palestina sebagai negara yang merdeka. Dengan dalih seperti itu, wajar apabila negara-negara yang kontra terhadap normalisasi ini menganggap UEA sebagai pengkhianat bagi muslim dan Palestina. Sebagai pemimpin di kawasan UEA seharusnya memiliki sikap yang tegas terhadap Israel dan membantu mempercepat perdamaian di kawasan sesuai dengan yang selama ini diupayakan oleh negara-negara Arab.

Dalam sejarahnya, sebelum disepakatinya normalisasi, sangat aktif memberikan pernyataan dukungan terhadap Palestina. Misalnya ketika ada kekerasan yang dilakukan oleh Israel terhadap warga Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza, UEA mengutuk dan mengkritik tindakan Israel dan menganggap itu

sebagai tindak kejahatan perang. Sementara itu, Presiden UEA dan Amir Abu Dhabi Sheikh Khalifa bin Zayed al-Nahyan pada November 2013 menyatakan:

“Today, we in the UAE are renewing our solidarity and our support for the Palestinian people in their just and legitimate struggle to end the Israeli occupation in their homeland and to fully recognize their national rights together with all other nations of the world.” (The National, 2017)

Dukungan UEA untuk Palestina lainnya yakni mempromosikan dan meningkatkan dukungan ekonomi dan politik untuk Muhammad Dahlan sebagai pemimpin Palestina selanjutnya. Dukungan ini bermaksud untuk menunjukkan bahwa UEA masih memiliki kepedulian dan keberpihakan terhadap posisinya dalam konflik Palestina-Israel. (Asseraf, 2017)

Untuk merespon tanggapan dari negara-negara Arab terkait dengan normalisasi yang terjalin. UEA menegaskan bahwa posisinya saat ini masih sama yakni mendukung kemerdekaan Palestina dan menantang segala bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap Palestina. Menurut UEA, normalisasi yang terjalin saat ini salah satunya ditujukan untuk Palestina dimana dalam kesepakatannya UEA menginginkan adanya penangguhan dan penghentian ekspansi yang dilakukan oleh Israel di Tepi Barat sebagai bagian dari kesepakatan. Melansir dari Arab News, Dubes UEA untuk Prancis, Ali Abdullah al-Ahmed, memberikan pernyataan terkait dengan pentingnya peranan Amerika Serikat sebagai pihak ketiga dalam stabilitas di kawasan dan penghentian konflik di Palestina yaitu:

“We are convinced that this trilateral agreement between the UAE, Israel and the US as a principal actor, especially with the strengthening of the US

presence in our region, will contribute in enhancing peace, security and stability in the region.”

Al-Ahmed menambahkan jika Israel ingin hidup damai di kawasan, maka yang harus dilakukan oleh Israel adalah melakukan kesepakatan yang sama dengan negara-negara Arab lainnya dan sama-sama menjamin kepentingan kedua belah pihak yang setara (Takieddine, 2020).

2.3 Kesimpulan

Hubungan UEA dan Israel merupakan hubungan yang rumit karena keberpihakan UEA pada Palestina atas konflik Israel dan Palestina. Dalam sejarahnya, Israel merupakan musuh besar bagi UEA dan negara-negara Arab karena telah mengambil hak yang seharusnya dimiliki oleh Palestina. Namun hubungan UEA dengan Israel ini perlahan-lahan mulai membaik dan UEA mulai melunak untuk membuka hubungan dengan Israel. UEA dan Israel tercatat mengadakan pertemuan sembunyi-sembunyi pada tahun 2012 di Sidang Umum PBB di New York. UEA akhirnya bisa menormalisasi hubungan dengan Israel setelah ditengahi oleh Amerika Serikat dan sepakat untuk normalisasi hubungan melalui Abraham Accord. Peristiwa ini menimbulkan kontroversi dimana terdapat beberapa kecaman yang ditujukan pada UEA oleh beberapa negara Arab dan menyebut UEA sebagai pengkhianat Palestina. Namun UEA tetap bersikukuh mereka masih berada di pihak Palestina. Normalisasi ini ada kaitannya dengan dinamika hubungan UEA dengan Iran di kawasan dimana Iran dinilai sebagai negara yang mempunyai keinginan untuk mendominasi di kawasan dan itu dinilai membahayakan oleh UEA dengan dibuktikan pada beberapa peristiwa intervensi